



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARNO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT**
3. NHK : **450897**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.625.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/72 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 760 m2 di PURWOREJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1658 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 637 m2 di PURWOREJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 267 m2 di PURWOREJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1218 m2 di PURWOREJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 1837 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 824 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/150 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
10. Tanah Seluas 1144 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **223.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000
4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SYNCLAIN 3 SEPEDA Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.150.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.070.851.622
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.920.001.622
III. HUTANG	Rp.	114.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.806.001.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.